

INDEKS SUBJEK**A**

Analisis data panel	92, 141
APBN/APBD	182, 184, 194, 195
Asuransi gempa	16, 21, 22

B

Belanja pemerintah daerah	197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207
Bea keluar	241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250
BBM bersubsidi	209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224

D

Data mikro	119, 125, 126, 141
<i>Debt sustainable framework</i>	99

E

Ekonomi internasional	155
Ekstensifikasi	119, 120, 122, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138 139
Ekspor	241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
<i>External debt</i>	99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112 113, 114, 115, 116, 117

F

Fasilitas umum	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
<i>Female</i>	229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
<i>Foreign currency</i>	99, 101, 102, 115, 117

H

<i>Highest and best us</i>	1, 2, 11, 13
Harga minyak mentah (ICP)	57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

I

<i>Income inequality</i>	229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
Insentif pajak	69, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 80
Investasi privat	197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207

J

Jarak garis lurus	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Jarak jalanan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

K

Kebijakan fiskal	125, 155, 156, 157, 161, 167
Kepatuhan pajak	120, 123
Kesempatan kerja	197, 198, 199, 201, 207
Konsumsi	209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224
Kredit usaha rakyat	38, 39, 44

INDEKS SUBJEK**M**

Model peramalan 155
Minyak sawit mentah

N

Nilai tukar 241, 242, 243, 244, 245, 248, 250, 251

P

Pajak properti 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13
Penerimaan pajak 2, 3, 12
Pengeluaran listrik rumah tangga 141, 142, 143, 147, 149, 150,
Pengeluaran rumah tangga 15, 20, 25, 26, 27, 28
Perdagangan bilateral 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97
Pertumbuhan PDB 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80
Pertumbuhan penerimaan pajak 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80
Perubahan iklim 181, 182, 184, 195
Potensi pajak 120
Proyeksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Premi asuransi bencana 15, 19, 29, 32

R

Ratio 99, 100, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116
117
RAN-GRK 181, 182, 183,
Return to education 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
Risiko fiskal 37, 38, 44, 50, 51, 52

S

Solvency 99, 100, 102, 103, 104, 108, 111, 114, 117
Sosiokultural 86, 87
Subsidi BBM 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218

T

Teori gravitasi 85, 88

U

Usaha mikro, kecil, dan menengah 38

W

Wajib pajak orang pribadi 120, 124, 137
Model peramalan 155
Minyak sawit mentah 241, 247, 248

N

Nilai tukar 241, 242, 245, 248, 250, 251

P

Pajak properti 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13

PERFORMA BELANJA PEMERINTAH DAERAH, INVESTASI PRIVAT DAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA

Regional Governments Spending, Private Investment and Employment Performance in Indonesia

Budiyanto¹, D.S. Priyarsono², Bonar M. Sinaga³, Tahlim Sudaryanto⁴

^{1 2 3} Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Jln. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16116, Jawa Barat, Indonesia

¹ Email: gadhangku@gmail.com

² Email : priyarsono@yahoo.com

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian
Jln. Ragunan No. 29, Jakarta Selatan 12540, DKI Jakarta, Indonesia

Naskah diterima: 17 Juni 2014

Naskah direvisi: 27 November 2014

Disetujui diterbitkan: 4 Desember 2014

ABSTRACT

The amount and composition of government spending in fiscal operations has a significant impact on aggregate demand and national output and affects resource allocation in an economy. Therefore, in order to achieve effective economic development, government spending has to be allocated appropriately according to the potentials of each area. Indonesia, which consists of areas with a variety of potential resources would require the determination of the amount and composition of different government spending in order to have an impact on the growth of private investment and employment opportunities are maximized. The purpose of this study is to examine the regional government expenditure performance, private investment and employment opportunities in the area where contribution of the agricultural sector to GRDP is high and low. The study utilizes an econometric model of the system of simultaneous equations using a panel of data of 20 provinces in Indonesia for the period of 2003-2011. The 20 sampled provinces were classified into two groups, based on contribution of agriculture sector to the respective regional economy. The estimation results indicate that the determination of the amount of local government spending, both in the areas where the contribution of the agricultural sector to GRDP is either high or low, based on the activity or program of the previous year. Meanwhile, the greater the number of regional government spending for the agricultural sector, the private investment of agricultural sector and employment is increasing.

Keywords: employment, privat investment, regional government spending

ABSTRAK

Besaran dan komposisi belanja pemerintah, dalam operasi fiskal, mempunyai dampak signifikan pada permintaan agregat dan *output* nasional, serta mempengaruhi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi secara efektif maka penetapannya perlu dilakukan secara tepat sesuai potensi daerah. Indonesia yang terdiri dari daerah-daerah dengan beragam potensi sumber daya tentunya memerlukan penetapan besaran dan komposisi belanja pemerintah yang berbeda agar berdampak pada tumbuhnya investasi privat dan kesempatan kerja yang maksimal. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui perilaku belanja pemerintah daerah, investasi privat dan kesempatan kerja di daerah PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Studi

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Studi Pengarusutamaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia**

- **Performa Belanja Pemerintah Daerah, Investasi Privat dan Kesempatan Kerja di Indonesia**

- **Efektivitas Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi di Jawa-Bali**

- ***Income Inequality : Education as The Panacea***

- **Dampak Bea Keluar terhadap Ekspor CPO Indonesia**

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 18	No. 3	Desember 2014	Halaman : 181 - 254
------------------	---------	-------	---------------	---------------------

menggunakan model ekonometrika dengan persamaan sistem simultan untuk mengestimasi data panel pada dua puluh provinsi di Indonesia periode 2003-2011. Sampel dua puluh provinsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok daerah yang memiliki PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penetapan besaran belanja pemerintah daerah, baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah, lebih didasarkan pada kegiatan atau program tahun sebelumnya. Sementara itu, semakin besar jumlah belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian, maka investasi privat sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat.

Kata Kunci: belanja pemerintah daerah, investasi privat, kesempatan kerja

JEL Classification: H5, H3, J2

I. PENDAHULUAN

Investasi, baik sektor publik (belanja pemerintah) maupun sektor privat, mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan Model Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara atau daerah berupaya untuk selalu meningkatkan investasi dari waktu ke waktu.

Pemerintah memiliki sumber keuangan yang lebih besar sehingga peran belanja pemerintah terhadap perekonomian relatif lebih banyak dibanding investasi privat. Jhingan (2008, hal 388-390) menyebutkan peranan belanja negara dalam pembangunan ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, dalam mendorong inisiatif dan usaha swasta dan dalam mewujudkan keseimbangan regional di dalam perekonomian.

Kaitannya dengan peran belanja pemerintah tersebut, maka sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah ditantang untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang tepat, dan membelanjakan pada hal-hal yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat sehingga belanja pemerintah mampu memberikan eksternalitas terhadap tumbuhnya investasi privat dan kegiatan ekonomi masyarakat serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Belanja pemerintah memang harus dialokasikan untuk pembangunan seluruh sektor perekonomian, tetapi mengingat pertimbangan keterbatasan sumber daya dan pencapaian tujuan pembangunan maka perlu dilakukan skala prioritas untuk suatu sektor tertentu. Kontribusi sektor pertanian, baik kepada PDB (Produk Domestik Bruto) maupun lapangan kerja memang terus menurun. Namun sektor pertanian sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik) pada Agustus 2013 masih menyerap tenaga kerja sekitar 34.78 persen dari total tenaga kerja, sehingga sektor pertanian sebenarnya masih layak untuk mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan nasional.

Pembangunan yang memfokuskan pada sektor pertanian sesuai pendapat para ahli pembangunan, yang mana sebagian besar negara yang mengadopsi kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor pertanian justru cenderung lebih berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding strategi pembangunan yang menekankan pada sektor nonpertanian, seperti yang disampaikan Mellor (1995) dan Rostow (1960).

Pada tahun 2012 secara administrasi pemerintahan, Indonesia terdiri dari 33 provinsi dengan 497 kabupaten/kota, yang mana memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang beragam. Sektor pertanian di sebagian daerah masih mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian, baik dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pangan, maupun penyerapan tenaga kerja. Tetapi sebagian daerah lainnya, sektor pertanian kurang dominan dalam perekonomian. Dengan demikian, timbul pertanyaan: apakah daerah atau provinsi-provinsi yang kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB relatif tinggi perlu memfokuskan pembangunannya pada

sektor pertanian dan/atau sektor nonpertanian agar lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi, begitu juga daerah atau provinsi-provinsi yang kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB relatif rendah.

Di lain pihak, investasi privat sektor pertanian selama ini dianggap kurang memberikan keuntungan sehingga investasi privat untuk sektor pertanian setiap tahun relatif kecil dibanding investasi sektor nonpertanian. Data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menunjukkan bahwa selama tahun 2003-2011 rata-rata investasi privat untuk sektor pertanian hanya sekitar 10.9 persen dari total investasi. Padahal pembangunan pertanian dengan meningkatkan produktivitasnya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Selain hal tersebut, masalah ketenagakerjaan perlu juga mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan. Upaya Indonesia untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum menampakkan hasil signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Agustus 2013 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 110,8 jiwa dan pengangguran terbuka 6,25 persen. Jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya, dapat dikatakan terjadi penurunan atau stagnasi penciptaan lapangan kerja, yang mana pada Agustus 2012 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 110,81 jiwa dan pengangguran terbuka sebesar 6,14 persen. Priyarsono (2011, hal 27) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir cenderung didorong oleh peningkatan konsumsi, sementara investasi privat tidak meningkat. Dengan demikian, meskipun perekonomian telah meningkat namun penciptaan lapangan kerja sangat lambat.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana perilaku belanja daerah, apakah belanja di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi atau rendah, ditetapkan berdasarkan potensi daerah atau kebutuhan pembangunan daerah, serta terkait dengan upaya untuk meningkatkan investasi privat dan meningkatkan kesempatan kerja?. Tujuan studi ini untuk mengetahui perilaku belanja pemerintah daerah, investasi privat dan kesempatan kerja di daerah PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fungsi Pengeluaran (Belanja) Pemerintah Daerah

Peran belanja pemerintah di negara maju berbeda dengan di negara terbelakang. Tulsidharan (2006, hal. 170) menyatakan bahwa peran pengeluaran pemerintah (sektor publik) di negara maju terutama ditujukan untuk stabilisasi perekonomian, stimulasi aktivitas investasi privat dan sebagainya. Sedangkan di negara terbelakang pengeluaran pemerintah memainkan peran aktif dalam mengurangi disparitas regional, pengembangan *social overheads*, penciptaan infrastruktur pertumbuhan ekonomi dalam bentuk fasilitas transportasi dan komunikasi, pendidikan dan latihan, pertumbuhan industri barang-barang modal, pertumbuhan industri dasar dan utama, *research and development*, stimulasi tabungan nasional, pembentukan modal dan sebagainya.

Secara teori, kebutuhan fiskal (belanja pemerintah) bukan ditentukan oleh penerimaan daerah namun justru sebaliknya, yaitu penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh kebutuhan daerah, seperti disampaikan Stiglitz (2000). Musgrave and Peggy (1989). Tetapi pada realisasinya, pengeluaran pemerintah ditentukan oleh penerimaan daerah. Di lain pihak, salah satu diantara beberapa interpretasi dari hukum Wagner adalah peningkatan aktivitas ekonomi akan menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah, seperti disampaikan Liu, Hsu, dan Younis (2008). Dengan demikian, besaran pengeluaran pemerintah daerah ditentukan oleh aktivitas ekonomi daerah, atau dalam hal ini adalah PDRB. Selain aktivitas ekonomi, besaran pengeluaran daerah juga ditentukan oleh luas wilayah dan jumlah penduduk.

2.2. Fungsi Investasi Privat

Terdapat perbedaan pendapat tentang dampak peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap investasi. Pendapat tradisional menyebutkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah menyebabkan investasi privat *crowding-out*. Pendapat nontradisional mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menstimulasi investasi, seperti disampaikan Ahmed dan Miller (2000). Barro (1990, hal 122) menyatakan bahwa pajak (pajak digunakan untuk belanja pemerintah) menyebabkan berkurangnya laba setelah pajak dari investasi privat, sehingga mengakibatkan investasi menurun.

Wang (2005, hal 494) menyebutkan bahwa jika belanja pemerintah meningkat, utamanya yang didanai dari pinjaman, *interest rate* di pasar uang bergerak naik karena permintaan uang meningkat. Konsekuensi kenaikan *interest rate* adalah menurunnya investasi privat. Pendapat lain yang berbeda, peningkatan belanja pemerintah akan mengakibatkan kenaikan tingkat pendapatan yang selanjutnya bisa meningkatkan investasi privat, karena peningkatan tabungan sebagai akibat kenaikan pendapatan, akan mendorong investasi yang lebih besar.

Selain pengeluaran pemerintah, sesuai teori Ekonomi Makro, investasi juga dipengaruhi oleh *interest rate* (tingkat suku bunga). Semakin tinggi *interest rate*, investasi yang layak dilaksanakan semakin sedikit sehingga investasi privat kecil, dan sebaliknya, jika *interest rate* rendah, jumlah jenis investasi yang layak dilaksanakan semakin banyak sehingga investasi privat banyak masuk.

2.3. Fungsi Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam perkembangan ekonomi di negara-negara maju tampak bahwa pada tahap awal pembangunan, kontribusi relatif sektor pertanian sangat dominan, dan selanjutnya akan terus menurun sampai pada tahap tertentu. Di sisi lain, kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja juga akan menurun yang diimbangi oleh peningkatan peran sektor industri dan jasa. Fenomena seperti ini oleh Todaro (2000), Hayami dan Ruttan (1981) disebut dengan proses transformasi struktural.

Kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan kecondongan garis yang menurun terhadap upah tenaga kerja. Hal ini sesuai teori produksi perusahaan, yang mana suatu perusahaan akan menggunakan jumlah tenaga kerja secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba maksimal. Jumlah optimal penggunaan tenaga kerja dicapai ketika nilai produk fisik marginal (*value of marginal physical product*) tenaga kerja sama dengan upah tenaga kerja. Oleh karena itu perusahaan akan menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang digunakan sesuai dengan biaya (upah) tenaga kerja. Apabila upah meningkat, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan. Di pihak lain, jika pengeluaran pemerintah untuk belanja modal dan investasi meningkat juga membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar.

III. METODOLOGI

3.1. Data

Kajian ini menggunakan data panel yang meliputi: belanja pemerintah daerah, investasi, penyerapan tenaga kerja pada 20 provinsi di Indonesia selama tahun 2003 sampai 2011. Data provinsi yang relatif baru terbentuk (provinsi yang terbentuk setelah tahun 1999) digabungkan atau diakumulasikan dengan data provinsi induknya. Dipilih data pada 20 provinsi di Indonesia karena data pada provinsi lainnya tidak tersedia secara *series*. Digunakannya data tahun 2003 sampai 2011 dengan dasar bahwa format penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sesuai dengan penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai tahun 2003 setelah adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dan ketersediaan data ketika dilakukan pengumpulan data, yaitu data tahun 2011. Sumber data: Badan Pusat Statistik, Direktort Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data belanja pemerintah daerah merupakan akumulasi dari realisasi anggaran belanja pemerintah kabupaten, kota serta provinsi. Data yang terkumpul dari tiap-tiap provinsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu data provinsi yang memiliki proporsi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pertanian tinggi (lebih besar dari rata-rata) dan rendah (lebih kecil dari rata-rata).

3.2. Identifikasi dan Estimasi Model

Untuk menjawab permasalahan studi digunakan pendekatan model ekonometrika dengan persamaan sistem simultan. Digunakannya persamaan sistem simultan karena adanya hubungan dua arah antara variabel endogen. Uji *random atau fixed effect* terhadap data tidak dilakukan karena diasumsikan data yang digunakan termasuk *pooled data*.

Model ekonometrika dengan persamaan sistem simultan digunakan sebagai pengembangan model yang digunakan dalam studi sebelumnya. Kim dan Cayer (1997) meneliti tentang perubahan pengeluaran pemerintah di Korea dengan pendekatan model ekonometrika, persamaan tunggal; Ahmed dan Miller (2000) meneliti tentang disgregasi pengeluaran pemerintah dan investasi privat juga menggunakan model ekonometrika dengan persamaan tunggal. Sementara itu, Wang (2005) menggunakan *cointegration and error-correction* untuk mengestimasi hubungan pengeluaran pemerintah Kanada dengan investasi privat. Jiranyakul dan Brahmasrene (2007) menggunakan *granger causality test* dan OLS untuk mengetahui hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di India; Liu, Hsu, dan Younis (2008) mengestimasi hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di USA dengan menggunakan *granger causality test*; dan World Bank (2009) melakukan studi tentang hubungan pengeluaran publik untuk sektor pertanian dan pertumbuhan PDB sektor pertanian di Indonesia dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika, persamaan tunggal. Dengan demikian model yang dispesifikasi adalah sebagai berikut:

a. Belanja (Pengeluaran) Pemerintah Daerah

- 1) Belanja untuk sektor pertanian :

$$PSA_{it} = a_0 + a_1 LATS_{it} + a_2 JTB_{it} + a_3 LATP_{it} + a_4 LAHUT_{it} + a_5 JNL_{it} + a_6 TREVD_{it} + a_7 LPDRBA_{it} + a_8 LPSA_{it} + a_9 D_{it} + u_{it}$$

- 2) Belanja untuk sektor non pertanian :

$$PSNA_{it} = b_0 + b_1 LW_{it} + b_2 POP_{it} + b_3 LPDRBNA_{it} + b_4 TREVD_{it} + b_5 LPSNA_{it} + b_6 D_{it} + u_{it}$$

b. Investasi

- 1) Investasi privat sektor pertanian :

$$INVSA_{it} = c_0 + c_1 PSA_{it} + c_2 PPL_{it} + c_3 TSBR_{it} + c_4 LW_{it} + c_5 POP_{it} + c_6 LINVSA_{it} + c_7 D_{it} + u_{it}$$

- 2) Investasi privat sektor non pertanian :

$$INVSNA_{it} = d_0 + d_1 PSNA_{it} + d_2 TSBR_{it} + d_3 POP_{it} + d_4 LW_{it} + d_5 LINVSNA_{it} + d_6 D_{it} + u_{it}$$

c. Kesempatan Kerja

- 1) Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian :

$$TKSA_{it} = e_0 + e_1 PINVSA_{it} + e_2 UTKAR_{it} + e_3 PSA_{it} + e_4 LTKSA_{it} + e_5 D_{it} + u_{it}$$

- 2) Penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian :

$$TKSNA_{it} = f_0 + f_1 INVSNA_{it} + f_2 RUTKR_{it} + f_3 PSNA_{it} + f_4 LTKSNA_{it} + f_5 D_{it} + u_{it}$$

keterangan :

PSA = belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian riil (Rp miliar), PSNA = belanja pemerintah daerah untuk sektor non pertanian riil (Rp miliar), LATS = luas areal tanaman semusim (ribu hektar), JTB = jumlah ternak besar (ribu ekor), LAMP = luas areal tanaman perkebunan (ribu hektar), LAHUT = luas areal hutan (ribu hektar), JNL = jumlah nelayan (ribu orang), TREVD = total penerimaan pemerintah daerah riil (Rp miliar), LPDRBA = PDRB riil sektor pertanian tahun t-1 (miliar rupiah), LPSA = belanja untuk sektor pertanian riil tahun t-1 (Rp miliar), LW = luas wilayah (ribu km²), POP = jumlah penduduk (juta jiwa), LPDRBNA = PDRB riil sektor non pertanian tahun t-1 (Rp miliar), LPLSNA = belanja untuk sektor non pertanian riil tahun t-1 (Rp miliar), INVSNA = investasi privat sektor pertanian riil (Rp miliar), INVSNA = investasi privat sektor non pertanian riil (Rp miliar), PPL = persentase belanja langsung terhadap total belanja pemerintah daerah (persen), TSBR = tingkat suku bunga riil (persen), LINVSA = investasi privat sektor pertanian riil tahun t-1 (Rp miliar), LINVSNA = investasi privat sektor non pertanian riil tahun t-1 (Rp miliar), TKSA = penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (ribu jiwa), TKSNA = penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian (ribu jiwa), PINVSA = persentase investasi sektor pertanian terhadap total investasi (persen), UTKAR = upah tenaga kerja sektor pertanian riil (Rp ribu/bulan), RUTKR = rata-rata upah tenaga kerja riil (Rp ribu/bulan), LTKSA = penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun t-1 (ribu jiwa), LTKSNA = penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian tahun t-1 (ribu jiwa), D = *dummy variable*: nilai 1 untuk daerah yang proporsi PDRB sektor pertanian tinggi; dan nilai 0 untuk daerah yang proporsi PDRB sektor pertanian rendah, u = komponen error

Identifikasi model ditentukan atas dasar *order condition* sebagai syarat keharusan dan *rank condition* sebagai syarat kecukupan. Menurut Koutsoyiannis (1982, hal 358), hasil identifikasi untuk setiap persamaan struktural haruslah *exactly identified* atau *over identified* untuk dapat menduga parameter-parameternya. Syarat kecukupan dituangkan dalam *rank condition* untuk identifikasi yang menyatakan bahwa dalam suatu persamaan teridentifikasi jika dan hanya jika dimungkinkan untuk membentuk minimal satu determinan bukan nol pada order (G-1) dari parameter struktural peubah yang tidak termasuk dalam persamaan tersebut.

Model meliputi: 6 persamaan (G), yang terdiri dari: 28 variabel atau peubah (K), serta antara 5 sampai 9 variabel dalam suatu persamaan (M); sehingga $K - M = 19$ dan $G - 1 = 5$, maka $(K - M) > (G - 1)$. Oleh karena itu berdasarkan kriteria *order condition* maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara berlebih (*over identified*) sehingga dapat diduga parameter-parameternya. Selanjutnya, estimasi model dilakukan dengan metode *Two Stage Least Squares (2SLS)*.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Perilaku Belanja Pemerintah Daerah

4.1.1. Persamaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian

Jumlah ternak besar, luas areal perkebunan dan hutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian dapat diartikan bahwa penetapan jumlah belanja pemerintah untuk sektor pertanian telah didasarkan pada potensi sumberdaya daerah. Namun demikian, jika dilihat pengaruh luas areal tanaman semusim, yang negatif dan signifikan pada $\alpha = 0.20$, dan pengaruh jumlah nelayan yang positif dan tidak signifikan serta pengaruh jumlah PDRB pertanian tahun sebelumnya yang negatif dan signifikan maka hal ini dapat menjadi bukti bahwa penetapan jumlah atau besaran belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian belum dilakukan dengan dasar kebutuhan pembangunan sektor tersebut. Pemerintah daerah barangkali berpendapat bahwa semakin

tinggi PDRB suatu sektor maka sektor tersebut telah mengalami kemajuan atau perkembangan yang berarti sehingga belanja pemerintah daerah untuk pengembangan sektor tersebut perlu dikurangi dan dialokasikan pada sektor lainnya yang kurang berkembang.

Bukti pendukung lainnya, bahwa belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian tidak didasarkan pada kebutuhan dan potensi daerah adalah pengaruh total penerimaan pemerintah daerah yang berpengaruh positif dan signifikan. Belanja untuk sektor pertanian tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan dapat diartikan juga bahwa penetapan jumlah belanja untuk sektor pertanian pada semua daerah di Indonesia lebih didasarkan pada kebiasaan atau rutinitas penyusunan anggaran kegiatan dan program, kurang didasarkan pada kebutuhan pembangunan sektor tersebut. Sedangkan *dummy variable* yang berpengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian di daerah PDRB sektor pertanian tinggi, lebih besar dibanding di daerah PDRB sektor pertanian rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah PDRB sektor pertanian tinggi telah mengalokasikan belanjanya sesuai dengan kebutuhan daerah.

4.1.2. Persamaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Sektor Non-pertanian

Daerah yang memiliki wilayah lebih luas tentunya akan mengalokasikan belanjanya untuk sektor non pertanian yang lebih besar dibanding daerah yang memiliki wilayah lebih sempit. Hal ini sesuai dengan hasil estimasi yang menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah untuk sektor non pertanian. Alokasi belanja pemerintah daerah untuk sektor non pertanian tersebut diduga lebih banyak digunakan untuk peningkatan ketersediaan infrastruktur.

Tabel 4.1. Hasil Estimasi Parameter dan Elastisitas Variabel Persamaan Struktural Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2003 - 2011

Variabel	Parameter	t-hit	Prob. t	Elastisitas	
				Jgk.Pendek	Jgk.Panjang
Belanja Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian					
1. Intersep	-3.64621	-0.25	0.8010		
2. Luas areal tanaman semusim	-0.02513	-1.43	0.1533	-0.1100	-0.14984
3. Jumlah ternak besar	0.032048	2.57	0.0110	0.0817	0.111283
4. Luas areal perkebunan	0.030060	3.70	0.0003	0.1054	0.143556
5. Luas areal hutan	0.001578	1.71	0.0884	0.0385	0.052447
6. Jumlah nelayan	0.005354	0.05	0.9622	0.0023	0.003156
7. Total penerimaan daerah	0.028087	10.81	<.0001	0.7349	1.000938
8. PDRB pertanian riil t-1	-0.00341	-3.85	0.0002	-0.1879	-0.25585
9. Belanja untuk sektor pertanian riil t-1	0.265776	4.72	<.0001		
10. <i>Dummy variable</i>	43.89845	3.75	0.0002		
Durbin-Watson	1.97161			F-Hitung	83.30
R-Square	0.81604			Prob>F	<0.0001
Belanja Pemerintah Daerah untuk Sektor Non-pertanian					
1. Intersep	-19.4428	-0.17	0.8632		
2. Luas wilayah	1.796023	3.25	0.0014	0.059581	0.06981
3. Jumlah penduduk	-37.8085	-4.18	<.0001	-0.15426	-0.18074
4. PDRB sektor non pert. riil t-1	-0.00162	-1.13	0.2580	-0.04024	-0.04715
5. Total penerimaan daerah riil	0.395468	16.64	<.0001	1.016741	1.191288
6. Belanja untuk sektor non pertanian riil t-1	0.146519	2.53	0.0124		
7. <i>Dummy variable</i>	-103.585	-1.14	0.2541		
Durbin-Watson	1.581079			F-Hitung	314.05
R-Square	0.91635			Prob>F	<.0001

Sumber: Hasil olah data

Pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja pemerintah daerah untuk sektor nonpertanian, negatif dan signifikan. Diduga hal ini dikarenakan pemerintah daerah berpendapat bahwa ketika jumlah penduduk meningkat maka partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah juga meningkat. Sedangkan PDRB sektor non-pertanian tahun sebelumnya yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan, serta total penerimaan daerah dan belanja pemerintah daerah untuk sektor nonpertanian tahun sebelumnya yang berpengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa penetapan jumlah belanja pemerintah daerah untuk sektor nonpertanian kurang didasarkan pada kebutuhan pembangunan sektor tersebut, tetapi lebih ditentukan oleh total penerimaan daerah dan kebiasaan atau rutinitas penyusunan anggaran kegiatan dan program.

Dummy variable berpengaruh negatif dan tidak signifikan merupakan bukti bahwa pemerintah daerah PDRB sektor pertanian rendah tidak memberikan alokasi belanja untuk sektor non pertanian yang berlebih dibanding pemerintah daerah PDRB sektor pertanian tinggi.

4.2. Perilaku Investasi Privat

4.2.1. Persamaan Investasi Privat Sektor Pertanian

Belanja pemerintah yang langsung terkait dengan kegiatan dan program berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi privat sektor pertanian, yang berarti bahwa semakin besar belanja pemerintah yang langsung terkait dengan kegiatan dan program maka investasi privat sektor pertanian semakin meningkat, sesuai hasil studi Barro (1990) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk konsumsi berpengaruh negatif, sedang pengeluaran pemerintah untuk *productive service* berpengaruh positif terhadap investasi dan pertumbuhan.

Tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 0.15$ terhadap investasi privat sektor pertanian dapat diartikan bahwa investor sektor pertanian bertindak secara rasional, yaitu dengan mempertimbangkan *Net Present Value Discounted* dalam berinvestasi. Selain faktor tingkat suku bunga, faktor teknis, sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan pada suatu daerah juga menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya pada sektor pertanian.

Kegiatan pertanian akan membutuhkan media lahan yang relatif lebih luas dibanding dengan kegiatan sektor non pertanian. Dengan demikian diduga bahwa pada daerah-daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas akan banyak masuk investasi sektor pertanian. Tetapi dari hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa variabel luas wilayah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap investasi sektor pertanian. Hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di daerah yang memiliki wilayah lebih luas tersebut. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan menunjukkan bahwa investasi sektor pertanian yang dilakukan dalam bentuk *estate* dan tidak padat karya.

Investasi privat sektor pertanian tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan, berarti bahwa kegiatan investasi privat sektor pertanian dilakukan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang sebelumnya terdapat investasi sektor pertanian. Hasil estimasi menunjukkan bahwa *dummy variable* berpengaruh positif dan tidak signifikan, yang berarti bahwa nilai investasi privat sektor pertanian di daerah PDRB sektor pertanian tinggi relatif sama dengan di daerah PDRB sektor pertanian rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di daerah PDRB sektor pertanian tinggi.

Tabel 4.2. Hasil Estimasi Parameter dan Elastisitas Variabel Persamaan Struktural Investasi Privat Tahun 2003 – 2011

Variabel	Parameter	<i>t</i> -hit	Prob. <i>t</i>	Elastisitas	
				Jgk.Pendek	Jgk.Panjang
Investasi Privat Sektor Pertanian					
1. Intersep	-229.568	-1.41	0.1610		
2. Belanja utk sektor petani riil	0.147541	0.40	0.6863	0.1804	0.3004
3. Persen belanja langsung	8.949208	2.34	0.0204	2.0255	3.3721
4. Tingkat suku bunga riil	-11.1190	-1.48	0.1410	-0.3654	-0.6084
5. Luas wilayah	-0.19288	-0.55	0.5860	-0.0797	-0.1326
6. Jumlah penduduk	-0.68649	-0.17	0.8613	-0.0349	-0.0580
7. Invest sektor petani riil t-1	0.399322	5.75	<.0001		
8. <i>Dummy variable</i>	11.63694	0.21	0.8341		
Durbin-Watson	1.87633			F-Hitung	9.02
R-Square	0.26962			Prob>F	<0.0001
Investasi Privat Sektor Non Pertanian					
1. Intersep	-918.338	-1.68	0.0940		
2. Belanja utk sektor non pert riil	0.446895	2.31	0.0220	0.6830	1.0982
3. Tingkat suku bunga riil	-71.9691	-1.45	0.1482	-0.2904	-0.4669
4. Jumlah penduduk	118.3737	4.44	<.0001	0.7381	1.1866
5. Luas wilayah	-1.03208	-0.43	0.6646	-0.0523	-0.0841
6. Invest asi sektor non pertanian riil t-1	0.378087	6.38	<.0001		
7. <i>Dummy variable</i>	356.0635	0.95	0.3446		
Durbin-Watson	1.949241			F-Hitung	69.38
R-Square	0.70762			Prob>F	<0.0001

Sumber: Hasil olah data

4.2.2. Persamaan Investasi Sektor Non Pertanian

Investasi privat sektor non pertanian memberikan respon positif terhadap belanja pemerintah daerah untuk sektor non-pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat nontradisional yang mengemukakan bahwa belanja pemerintah dapat menstimulasi investasi. Investasi privat banyak masuk ketika sumberdaya ekonomi *un-and under employed*, yang mana hal itu biasa terjadi di banyak negara berkembang.

Sebagaimana pada persamaan investasi privat sektor pertanian, tingkat suku bunga juga berpengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 0.20$ terhadap investasi privat sektor non-pertanian. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi privat sektor non-pertanian dikarenakan pada daerah yang padat penduduknya tersedia tenaga kerja murah, infrastruktur yang mencukupi dan pangsa pasar yang besar. Dengan demikian, investor sektor non pertanian akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk besar.

Daerah-daerah dengan PDRB sektor pertanian tinggi memiliki wilayah rata-rata lebih luas dengan ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Dengan demikian, seharusnya variabel luas wilayah dan *dummy variable* berpengaruh negatif terhadap investasi sektor non-pertanian, tetapi hasil estimasi menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan. Hal ini diduga karena investasi privat sektor non-pertanian dilakukan dominan di beberapa daerah tertentu, seperti Provinsi Jawa Barat, Riau dan Jawa Timur. Dugaan tersebut didukung oleh pengaruh Investasi sektor non pertanian tahun sebelumnya yang berpengaruh positif dan signifikan, yang mana investasi privat sektor non pertanian akan semakin meningkat pada suatu daerah tertentu.

4.3. Perilaku Kesempatan Kerja

4.3.1. Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Diharapkan, dengan meningkatnya investasi privat sektor pertanian maka akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja, tetapi hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi sektor pertanian berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini diduga karena investasi sektor pertanian merupakan investasi skala besar yang berbentuk *estate* sehingga tidak *labour intensive* (sesuai hasil kajian Priyarsono, 2011).

Ketika upah naik maka permintaan terhadap tenaga kerja akan turun sehingga upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Belanja pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti bahwa semakin meningkat belanja pemerintah untuk sektor pertanian maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian semakin besar. Hal ini sesuai hasil kajian World Bank (2009) yang menunjukkan bahwa, kecuali untuk subsidi *input* privat, belanja pemerintah untuk sektor pertanian berdampak positif terhadap pertumbuhan *output* dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sedang subsidi *input* pertanian (misal: pupuk, benih) berdampak negatif.

Dummy variable berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian berarti bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di daerah PDRB sektor pertanian tinggi, tidak lebih besar dibanding dengan di daerah PDRB sektor pertanian rendah. Hal ini diduga karena sub-sektor pertanian yang berkembang di daerah PDRB sektor pertanian tinggi adalah sub-sektor perkebunan yang padat modal.

4.3.2. Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Non Pertanian

Penyerapan tenaga kerja sektor non-pertanian memberikan respon positif dan signifikan terhadap investasi privat sektor non-pertanian, belanja-pemerintah daerah untuk sektor non-pertanian, dan jumlah tenaga kerja sektor non pertanian tahun sebelumnya, serta memberikan respon negatif dan signifikan terhadap rerata upah tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan harapan bahwa jika belanja pemerintah untuk sektor non-pertanian ditingkatkan maka akan menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja secara langsung, dan secara tidak langsung melalui peningkatan investasi privat.

Dummy variable berpengaruh positif dan tidak signifikan dapat diartikan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor non-pertanian di daerah PDRB sektor pertanian rendah, tidak lebih besar dibanding dengan di daerah PDRB sektor pertanian tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa perkembangan sektor non-pertanian di daerah PDRB sektor pertanian rendah tidak signifikan dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja. Atau dengan kata lain, sektor non-pertanian yang berkembang di daerah PDRB sektor pertanian rendah merupakan sektor non-pertanian yang padat modal.

Tabel 4.3. Hasil Estimasi Parameter dan Elastisitas Variabel Persamaan Struktural Kesempatan Kerja Tahun 2003 – 2011

Variabel	Parameter	<i>t</i> -hit	Prob. <i>t</i>	Elastisitas	
				Jgk.Pendek	Jgk.Panjang
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian					
1. Intersep	459.3270	1.73	0.0846		
2. Persen invstasi sektor pertanian riil	0.09171	0.04	0.9707	0.0015	0.0046
3. Upah tenaga kerja pertanian riil	-2.45954	-3.79	0.0002	-0.4356	-1.3512
4. Belanja utk sektor pertanian riil	3.855386	5.82	<.0001	0.5061	1.5696
5. Tenaga kerja pertanian t-1	0.677601	14.73	<.0001		
6. <i>Dummy variable</i>	0.172378	0.00	0.9990		

Durbin-Watson	1.553754			F-Hitung	174.34
R-Square	0.83440			Prob>F	<.0001
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Non Pertanian					
1. Intersep	1986.900	3.69	0.0003		
2. Investasi non pertanian riil	0.387506	8.38	<.0001	0.2386	0.4683
3. Rerata upah tenaga kerja riil	-4.26621	-5.11	<.0001	-0.8661	-1.6997
4. Belanja utk sektor non petani	0.401557	4.70	<.0001	0.3779	0.7416
5. Ten kerja sektor non pertan t-1	0.490440	11.55	<.0001		
6. <i>Dummy variable</i>	23.08581	0.11	0.9153		
Durbin-Watson	1.249587			F-Hitung	340.11
R-Square	0.90766			Prob>F	<0.0001

Sumber: Hasil olah data

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Belanja pemerintah mempunyai peran strategis dalam perekonomian. Terbukti dari hasil studi ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah belanja pemerintah daerah yang langsung terkait dengan kegiatan dan program, utamanya belanja daerah untuk sektor pertanian, maka investasi privat sektor pertanian semakin meningkat. Selan itu, Belanja pemerintah daerah berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja di semua sektor perekonomian. Belanja pemerintah daerah berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja di semua sektor perekonomian. Oleh karena itu, besaran dan struktur alokasi belanja pemerintah daerah seharusnya ditetapkan secara tepat sesuai kebutuhan pembangunan dan potensi daerah. Tetapi berdasarkan hasil estimasi parameter dapat disampaikan bahwa penetapan besaran belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian maupun non-pertanian, baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah, lebih didasarkan pada kegiatan atau program tahun sebelumnya.

Selain belanja pemerintah, investasi privat juga diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Namun demikian, karena jenis investasi privat sektor pertanian merupakan investasi skala besar yang *labour intensive* maka investasi privat sektor pertanian kurang menciptakan lapangan kerja baru. Disamping itu, investasi privat di Indonesia terkonsentrasi pada daerah-daerah yang ketersediaan infrastrukturnya memadai.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Mengingat peran belanja pemerintah daerah, maka pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan belanja daerah yang langsung terkait dengan program dan kegiatan, dengan mengurangi belanja daerah yang tidak langsung terkait dengan program dan kegiatan. Khususnya pada daerah PDRB sektor pertanian tinggi, sebaiknya pemerintah daerah mengalokasikan belanja daerah untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah guna menarik investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. dan S.M. Miller. (2000). Crowding-out and Crowding-in Effects of The Components of Government Expenditure. *Contemporary Economic Policy*, 18(1): 124-133
- Barro, R.J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, 98: 103-125
- Hayami, Y and V.W. Ruttan. (1981). *Agricultural Development: An International Perspective*. Baltimore: The John Hopkins Press.

- Kaldor, N. (1966). *Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom: an Inaugural Lecture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koutsoyiannis, A. (1982). *Modern Microeconomics*. Second Edition. University of Waterloo, Ontario. Hongkong: The Macmillan Press LTD.
- Liu, L.C; C.E. Hsu and M.Z. Younis. (2008). The Association Between Government Expenditure and Economic Growth: Granger Causality Test of US Data, 1947-2002. *Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*, 20(4): 537-553
- Mellor, J.W. (1995). *Agriculture on the Road to Industrialization*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
- Musgrave, R.A. and B.M. Peggy. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Priyarsono, D.S. (2011). *Dari Pertanian ke Industri, Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*. Bogor: IPB Press.
- Stiglitz, J.E. (2000). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton and Company.
- Todaro, M.P. (2000). *Economic Development*. Seventh Edition. New York: Addison Wesley Longman. Inc.
- Tulsidharan, S. (2006). Government Expenditure and Economic Growth in India (1960 to 2000). *Finance India*, 20(1): 169-179
- Wang, B. (2005). Effects of Government Expenditure on Private Investment: Canadian Empirical Evidence. *Empirical Economics*. 30: 493-504
- World Bank. (2009). *Indonesia Agriculture Public Expenditure Review - Indonesia Agriculture Public and Growth*. Policy Notes. The World Bank Office Jakarta.

